



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 33
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2022**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mengintegrasikan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perkembangan yang terjadi dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022;
20. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 25 Februari 2022 Nomor: 1.B/LHP/XVIII.SBY/02/2022 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 21 Juli 2022

WALIKOTA MADIUN,
ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 21 Juli 2022

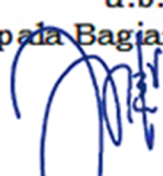
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 38/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepada Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kota Madiun dalam melaksanakan pembangunan pada Tahun 2022. Dokumen ini merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional. RKPD menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD Tahun 2022. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Perubahan kebijakan anggaran perlu diantisipasi oleh Pemerintah Daerah. Perubahan kebijakan anggaran pemerintah Tahun 2022 berdampak secara langsung terhadap APBD Tahun Anggaran 2022. Sementara kinerja pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021 secara tidak langsung berdampak terhadap APBD Tahun Anggaran 2022. Demikian pula dengan kinerja masing-masing Perangkat Daerah terhadap pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2019-2024. Dalam menyikapi proyeksi perubahan-perubahan baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka pelaksanaan program/kegiatan untuk tahun yang berjalan perlu disesuaikan dengan amanah RPJMD dan mengakomodir RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu perlu penyesuaian terhadap perubahan dalam pengalokasian dana bantuan penyelenggaraan pemerintah daerah, seperti dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya serta dana penyesuaian.

Perubahan terhadap RKPD perlu dilakukan sesuai dengan perubahan dinamika pembangunan. Dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Bulan Juni 2022 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Madiun Tahun Anggaran 2022, yang meliputi :

1. Perubahan Asumsi ekonomi Makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah;

Dengan ditetapkannya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 ini diharapkan nantinya dapat menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan. Selain itu, RKPD-P Kota Madiun Tahun 2022 dapat dijadikan sebagai media evaluasi bagi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Walikota dapat terwujud dan terukur hasil kerjanya sebagai bahan pertimbangan kebijakan untuk tahun-tahun berikutnya.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001